

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Piutang PBB Rp 148 Miliar, Cek Ulang Dilakukan

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.2

Edisi : Selasa, 15 Mei 2018

Piutang PBB Rp 148 Miliar, Cek Ulang Dilakukan

CIMAHI, (PR).-

Format penagihan tunggakan pajak beserta denda pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Cimahi 2018 yang sempat menimbulkan keresahan, dilakukan sebagai upaya *cross check*. Badan Pengelolaan dan Pendataan (Bapenda) Kota Cimahi mengaku *cross check* dilakukan terhadap data piutang PBB yang mencapai Rp 148 miliar.

Untuk menginformasikan hal tersebut, Bapenda Kota Cimahi menggelar sosialisasi sekaligus peluncuran SPPT PBB perdesaan dan perkotaan Kota Cimahi 2018 di Gedung Cimahi Technopark Cimahi, Senin (14/5/2018). Peserta yakni ketua RW yang diharapkan menyampaikan informasi tersebut kepada warga.

Total jumlah SPPT PBB yang dicetak tahun 2018 mencapai 126.000 lembar. Nilai

piutang PBB Rp 148 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 136 miliar.

Kepala Bapenda Kota Cimahi, Bambang Maulana mengatakan, tunggakan PBB muncul dengan harapan ada masukan dari warga selaku wajib pajak (WP). "Karena catatan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) meningkat terus setiap tahun. Terutama dari data sebelum PBB dilimpahkan ke Kota Cimahi tahun 2013," ujarnya.

Nilai piutang tersebut merupakan akumulasi sejak menerima pelimpahan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada 2013. Pelimpahan pengelolaan PBB dari KPP Pratama ke Pemkot Cimahi disertai data wajib pajak, surat perjanjian kerja sama, dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Namun, sejumlah masalah muncul, di antaranya dobel data WP, alamat WP tak jelas, dan munculnya nilai pi-

utang PBB yang besar.

Sejak 2016, kata dia, pemutakhiran data WP dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Termasuk, penyelesaian data piutang PBB yang harus di-*cross check*. Bambang mengakui, pembagian SPPT PBB 2018 tanpa informasi jelas menimbulkan keresahan. "Yang membuat ribut, muncul tunggakan di SPPT tanpa *print out* data detail sehingga warga bertanya-tanya. Itu kekurangan kami, maka kami siapkan layanan *print out* tunggakan di kantor. warga bisa menyamakan dengan data pribadi apakah sudah bayar atau menunggak," ucapnya.

Sebelumnya, warga mengeluhkan munculnya tagihan PBB 2012-2013 pada lembar (SPPT) PBB 2018. Tagihan tercatat berupa tunggakan pajak berikut denda yang harus dibayar, padahal warga sudah melunasinya. **(Ririn NF)*****